



REJANG LEBONG

MINGGU, 03 SEPTEMBER 2023

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

313 Randis Menunggak Pajak

CURUP - Sebanyak 313 unit kendaraan dinas milik Pemkab Rejang Lebong, diketahui menunggak pembayaran pajak terhutang sejak tahun 2018 hingga 2022 lalu. Adapun kendaraan yang menunggak pembayaran pajak ini jenis roda dua, kemudian kendaraan roda empat dan kendaraan roda enam.

Diungkapkan Kasi Penerimaan UPTD Samsat Rejang Lebong, Sabirin Ab-sah mengatakan, jumlah kendaraan dinas Pemkab Rejang Lebong yang masih menunggak pajak tercatat sebanyak 313 unit terdiri dari kendaraan roda dua sebanyak 262 unit, dan kendaraan roda empat dan enam sebanyak 51 unit.

"Tunggakan kendaraan dinas milik Pemkab Rejang Lebong tersebut terhutang sejak tahun 2018 hingga 2022 dengan nilainya mencapai Rp 167,8 juta terdiri dari kendaraan roda dua sebanyak 262 unit sebesar Rp 34,8 juta serta 51 unit kendaraan roda empat dan enam sebesar Rp 132,9 juta," terang Sabirin.

Adapun kendaraan dinas yang menunggak pajak ini, kata dia, untuk jenis jeep sebanyak enam unit, minibus 21 unit, kemudian microbus satu unit. Kendaraan jenis bus dua unit, kendaraan jenis pikap sebanyak 18 unit, truk tiga unit dan sepeda motor 262 unit.

"Jumlah kendaraan dinas milik pemkab daerah itu yang menunggak pembayaran pajak ini jumlahnya sudah berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 600 unit dengan nilai tunggakan lebih dari Rp 1 miliar," bebernya.

Kendaraan dinas yang menunggak pembayaran pajak ini, kata dia, terus berkurang setelah mengikuti program pemutihan pajak dari Pemprov Bengkulu. Hingga akhir Agustus 2023 ini sudah ada 189 unit kendaraan dinas yang mengikutinya terdiri dari 50 unit kendaraan roda empat dan 139 unit kendaraan roda dua dengan nilai pajak yang dibayarkan sebesar Rp 116,4 juta.

"Program pemutihan pajak kendaraan yang menunggak pembayaran pajak itu sendiri merupakan program Pemprov Bengkulu terhutang sejak 1 Mei hingga 30 November 2023 mendatang," ujar Sabirin.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Rejang Lebong Yusran Fauzi, ST mengatakan pihaknya dalam APBD Rejang Lebong 2023 telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran tunggakan pajak kendaraan dinas milik pemkab setempat. Menurutnya pembayaran tunggakan kendaraan dinas ini, sesuai dengan komitmen dengan Pemprov Bengkulu beberapa waktu lalu terkait pembayaran dana

bagi hasil (DBH) dari Pemprov Bengkulu yang salah satu sumbernya berasal dari pajak kendaraan masyarakat termasuk kendaraan dinas yang dibayarkan setiap tahunnya.

"Kita optimis kewajiban pajak kendaraan ini bisa segera tuntas di momen program pemutihan pajak ini. Karena anggarannya sudah ada," singkat Sekda. (sly)